



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 13 /KMA/SK/II/2010

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Keputusan Tim Promosi dan Mutasi Mahkamah Agung RI tanggal 23 Nopember 2009 antara lain tentang pemindahan / Pengangkatan Hakim Tinggi Pengawas dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ;
b. bahwa yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam Pangkat dan Jabatan tersebut dalam lajur 3 memenuhi syarat untuk dipindahkan / diangkat dalam Pangkat dan Jabatan tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini ;
c. bahwa formasi serta anggaran belanja pegawai yang bersangkutan mengijinkan akan pemindahan / pengangkatan tersebut ;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 ;
2. Undang - undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan terakhir dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2009 ;
3. Undang - undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 89 tahun 2001 tentang Tunjangan Hakim ;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 13 tahun 2004 tentang Sekretariat Mahkamah Agung ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2008 tentang perubahan kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Mahkamah Agung untuk penandatanganan di bidang Kepegawaian ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membebaskan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari Jabatan yang dipangkunya tersebut dalam lajur 3 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal meletakkannya Jabatannya ;

KEDUA

KEDUA : Memindahkan / mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam Pangkat dan Jabatan tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini, Terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaan dengan gaji pokok serta tunjangan-tunjangan lain yang diterimanya terakhir ;

KETIGA : kepadanya diberikan tunjangan Jabatan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 89 tahun 2001 sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini ;

KEEMPAT : Segala biaya yang bertalian dengan pemindahan ini ditanggung oleh Negara (Anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) ;


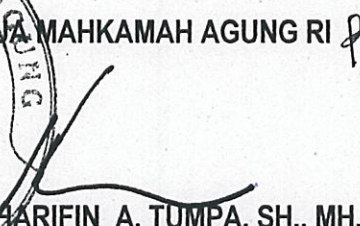
KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di Jakarta ;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta ;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA – RI di Jakarta ;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Surabaya dan Makassar ;
7. Direktur Perbendaharaan Negara di Jakarta ;
8. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
9. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta di Yogyakarta ;
10. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Yogyakarta dan Makassar ;
11. Pembuat Daftar Gaji Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta di Yogyakarta dan Pembuat Daftar Gaji Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Makassar ;
12. PT. TASPEN Kantor Cabang di Medan dan Makassar ;
13. PT. ASKES Kantor Cabang di Medan dan Makassar ;

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 12 Januari 2010


KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 13 /KMA/SK/2010
TANGGAL : 12 Januari 2010

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/JABATAN LAMA	GOL / RUANG	PANGKAT / JABATAN BARU	TUNJANGAN JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1 s/d 7	dst					
8	SLAMET SUPARJOTO, SH., M.Hum NIP. 040 053 736	Hakim Madya Utama / Pembina Utama Muda / Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta	IV/c	Hakim Madya Utama / Pembina Utama Muda / Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar	Rp. 3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh rupiah)	
9	dst					


MAHKAMAH AGUNG RI
DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.